



**PENGARUH BELANJA BARANG DAN JASA SERTA BELANJA MODAL
TERHADAP KAPASITAS FISKAL DI PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

Alviandra Ananta¹, Siti Fatimah²

Universitas Mataram^{1,2}

e-mail: vandra40@gmail.com

Diterima: 02/07/2026; Direvisi: 09/07/2026; Diterbitkan: 19/07/2026

ABSTRAK

Kapasitas fiskal daerah merupakan indikator penting dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah dan keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Namun, penelitian mengenai pengaruh komponen belanja daerah terhadap kapasitas fiskal di tingkat provinsi masih relatif terbatas, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada tingkat kabupaten/kota, sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas belanja daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal pada level provinsi. Penelitian ini penting dilakukan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kemampuan fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder berupa realisasi APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2011-2025 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak *EViews* 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa serta belanja modal berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kapasitas fiskal. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah yang efektif berkontribusi dalam memperkuat kapasitas fiskal serta mendukung terwujudnya kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, Kapasitas Fiskal, APBD, Kemandirian Fiskal.*

ABSTRACT

Regional fiscal capacity is an important indicator of financial independence and the successful implementation of fiscal decentralization. However, studies examining the influence of regional expenditure components on fiscal capacity at the provincial level remain limited, particularly in West Nusa Tenggara Province. Previous research has primarily focused on districts and municipalities, providing limited empirical evidence regarding the effectiveness of regional expenditure in strengthening provincial fiscal capacity. Therefore, this study is important to provide empirical evidence that can support more effective and sustainable regional budget management policies. This study aims to analyze the effect of expenditure on goods and services and capital expenditure on the fiscal capacity of West Nusa Tenggara Province. An associative quantitative approach was employed using secondary data from the realized *Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD)* of West Nusa Tenggara Province for the period 2011-2025 obtained from the Directorate General of Fiscal Balance. The data were analyzed using multiple linear regression with *EViews* 14. The results indicate that expenditure on goods and services and capital expenditure have a positive and significant effect on fiscal



capacity, both partially and simultaneously. These findings imply that effective regional expenditure management contributes to strengthening fiscal capacity and promoting sustainable regional financial independence.

Keywords: *Capital Expenditure, Fiscal Capacity, Goods and Services Expenditure, Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), Regional Financial Independence.*

PENDAHULUAN

Kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu indikator utama yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri. Dalam era desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mengelola belanja secara efektif sehingga menghasilkan ruang fiskal yang lebih kuat. Pengelolaan belanja daerah yang kurang efisien berpotensi menurunkan kemampuan fiskal, meningkatkan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, serta menghambat keberlanjutan pembangunan daerah. Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah, efektivitas pengelolaan fiskal, serta implementasi desentralisasi menjadi faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara berkelanjutan (Sulhia, 2025; Solihin, 2025; Fidmatan et al., 2025). Oleh karena itu, analisis mengenai hubungan antara belanja daerah dan kapasitas fiskal menjadi semakin penting sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal daerah yang lebih efektif.

Secara konseptual, kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya setelah dikurangi berbagai komponen pengeluaran tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023. Salah satu instrumen yang menentukan kuat atau lemahnya kapasitas fiskal adalah kualitas alokasi belanja daerah, khususnya belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa berperan menjaga keberlangsungan operasional pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, sedangkan belanja modal diarahkan untuk menciptakan aset tetap yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dalam jangka panjang. Menurut teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan Keynes, belanja pemerintah memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi yang selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sejalan dengan itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan aktivitas ekonomi regional, yang pada akhirnya memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah (Siburian et al., 2021; Ferli, 2022; Dwi, 2022).

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi pengelolaan APBD. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa selama periode 2011–2025 rata-rata belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai sekitar Rp4,39 triliun, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan daerah sebesar Rp4,38 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik terus meningkat sehingga pemerintah daerah dituntut mampu mengelola belanja secara lebih efektif agar tidak menimbulkan tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah. Peningkatan alokasi belanja pemerintah pada dasarnya diharapkan mampu mendorong kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, termasuk melalui



optimalisasi Dana Alokasi Khusus dan berbagai program prioritas pemerintah (Hazna, 2025; Koordinator, 2024). Namun demikian, belanja barang dan jasa maupun belanja modal yang terus meningkat belum tentu secara otomatis menghasilkan kapasitas fiskal yang lebih kuat apabila pengelolaannya belum efisien dan belum memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Hubungan antara belanja daerah dan kapasitas fiskal telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Nazikha dan Rahmawati (2021) menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu determinan penting dalam mendukung keberhasilan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selanjutnya, Wahyudi dan Nofianti (2025) melalui kajian sistematis menemukan bahwa efektivitas belanja modal memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas fiskal daerah, terutama apabila didukung oleh tata kelola keuangan yang baik. Selain itu, Dame et al. (2025) menegaskan bahwa kapasitas fiskal yang kuat menjadi prasyarat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada analisis konseptual, kajian lintas daerah, atau hubungan kapasitas fiskal dengan pembangunan dan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian, yaitu terbatasnya studi yang secara khusus menganalisis pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap kapasitas fiskal pada tingkat pemerintah provinsi, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan menggunakan data *time series* periode 2011–2025.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis empiris mengenai pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan data *time series* periode 2011–2025. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji hubungan belanja daerah dengan indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Yulita, 2024; Nugraha, 2025; Martalia, 2025), penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada kapasitas fiskal sebagai variabel dependen. Selain menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, penelitian ini juga mengacu pada regulasi terbaru mengenai peta kapasitas fiskal daerah sehingga diharapkan memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat; (2) apakah belanja modal berpengaruh terhadap kapasitas fiskal; dan (3) apakah kedua variabel tersebut secara simultan memengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh belanja barang dan jasa, belanja modal, serta pengaruh keduanya secara simultan terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian diharapkan memberikan bukti empiris mengenai efektivitas pengelolaan belanja daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai desentralisasi fiskal, pengelolaan belanja daerah, dan kapasitas fiskal, sedangkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merumuskan kebijakan penganggaran yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Harapan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menekankan pentingnya optimalisasi belanja daerah, desentralisasi fiskal, dan efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan ekonomi serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah (Assyifa & Muttaqin, 2024; Nurmala et al., 2025; Nimas, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif karena bertujuan menganalisis hubungan kausal antara variabel belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap kapasitas fiskal daerah. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur besarnya pengaruh antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik sehingga sesuai dengan tujuan penelitian untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas fiskal. Objek penelitian adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan unit analisis berupa data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun dalam bentuk *time series* selama periode 2011–2025. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data yang konsisten dan berkesinambungan serta mampu menggambarkan dinamika pengelolaan belanja daerah dan perkembangan kapasitas fiskal dalam jangka panjang. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dari laporan realisasi APBD yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas belanja barang dan jasa (X_1) dan belanja modal (X_2), sedangkan variabel dependen adalah kapasitas fiskal daerah (Y).

Analisis data diawali dengan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran karakteristik masing-masing variabel penelitian. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi guna memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)* sehingga hasil estimasi bersifat valid dan tidak bias. Hubungan antara variabel independen dan dependen dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan ($Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$), di mana (Y) adalah kapasitas fiskal, (X_1) adalah belanja barang dan jasa, dan (X_2) adalah belanja modal. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen, uji F untuk menguji pengaruh simultan kedua variabel terhadap kapasitas fiskal, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak *EViews 14* dengan tingkat signifikansi 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut, analisis dilakukan secara bertahap melalui statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis. Tahapan analisis tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan statistik sehingga hasil pengujian dapat diinterpretasikan secara akurat. Seluruh hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan gambar agar memudahkan pembaca memahami karakteristik data, kualitas model, serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Dengan demikian, bagian hasil tidak hanya menyajikan output statistik, tetapi juga memberikan interpretasi terhadap temuan yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan analisis inferensial. Melalui analisis ini dapat diketahui kecenderungan nilai masing-masing variabel, tingkat penyebaran data, serta variasi yang terjadi selama periode penelitian. Informasi tersebut penting karena memberikan gambaran mengenai

kondisi belanja barang dan jasa, belanja modal, serta kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2011-2025. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada Tabel 3.

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

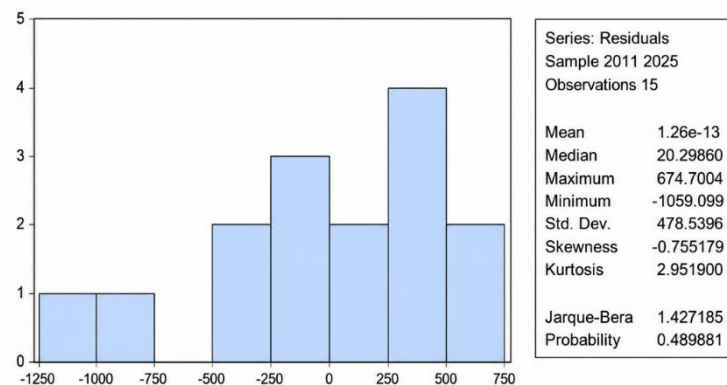
Statistik	Y	X1	X2
Mean	2696.757	1079.917	682.5673
Median	3127.840	968.9500	608.3000
Maximum	3582.170	2343.700	1313.670
Minimum	1060.160	276.4600	404.9900
Std. Dev.	794.1345	690.9771	271.1540
Skewness	-0.894156	0.525965	1.085018
Kurtosis	2.334152	1.991972	3.236815
Jarque-Bera	2.275884	1.326673	2.978210
Probability	0.320478	0.515130	0.225574
Sum	40451.36	16198.75	10238.51
Sum Sq. Dev.	1.18E+08	24177591	8017815
Sum Sq. Dev.	8829095.	6684291.	1029343.
Observations	15	15	15

Berdasarkan Tabel 1, variabel belanja barang dan jasa memiliki nilai minimum sebesar Rp276,46 miliar dan nilai maksimum sebesar Rp2.343,70 miliar dengan rata-rata sebesar Rp1.079,917 miliar. Rentang nilai yang cukup lebar tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja barang dan jasa mengalami perkembangan yang signifikan selama periode penelitian. Nilai standar deviasi sebesar Rp690,977 miliar mengindikasikan bahwa penyebaran data relatif tinggi, sehingga terdapat variasi belanja yang cukup besar antarperiode pengamatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi belanja barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang terus berkembang. Pada variabel belanja modal diperoleh nilai minimum sebesar Rp404,99 miliar dan nilai maksimum sebesar Rp1.313,67 miliar dengan rata-rata sebesar Rp682,567 miliar. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa belanja modal menjadi salah satu komponen penting dalam struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Standar deviasi sebesar Rp271,154 miliar menunjukkan bahwa variasi belanja modal lebih rendah dibandingkan belanja barang dan jasa,

sehingga alokasi belanja modal cenderung lebih stabil selama periode penelitian. Stabilitas tersebut mengindikasikan adanya konsistensi pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset tetap.

Sementara itu, kapasitas fiskal memiliki nilai minimum sebesar Rp1.060,16 miliar dan nilai maksimum sebesar Rp3.582,17 miliar dengan rata-rata sebesar Rp2.696,750 miliar. Nilai rata-rata yang relatif tinggi menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami perkembangan selama periode pengamatan, meskipun masih terjadi fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Standar deviasi sebesar Rp794,134 miliar menunjukkan adanya variasi kapasitas fiskal yang cukup besar, yang mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah dipengaruhi oleh perubahan pendapatan maupun kebijakan pengelolaan belanja daerah. Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif memperlihatkan bahwa ketiga variabel memiliki karakteristik yang cukup beragam sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi linier berganda guna menjawab tujuan penelitian.

Sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda, model penelitian harus memenuhi asumsi klasik agar hasil estimasi bersifat tidak bias dan dapat dipercaya. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar untuk menentukan kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki distribusi normal sehingga memenuhi salah satu asumsi dasar regresi linier. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji Jarque-Bera, dan hasilnya disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,489881, yaitu lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual model berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. Distribusi residual yang normal menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami penyimpangan distribusi yang dapat memengaruhi ketepatan estimasi parameter. Dengan terpenuhinya asumsi ini, analisis regresi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya sehingga hasil pengujian hipotesis dapat memberikan kesimpulan yang lebih valid. Temuan ini juga menunjukkan bahwa data penelitian memiliki kualitas yang memadai untuk menjelaskan hubungan antara belanja daerah dan kapasitas fiskal. Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang sangat kuat antarvariabel independen yang dapat menyebabkan ketidakstabilan model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas disajikan pada Tabel 4.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	161176.9	9.049230	NA
X1	0.041612	3.765688	1.041086
X2	0.270215	8.109287	1.041086

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada variabel belanja barang dan jasa maupun belanja modal sebesar 1,041086, atau berada jauh di bawah batas maksimum 10. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antarvariabel independen. Dengan demikian, masing-masing variabel mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kapasitas fiskal tanpa mengalami tumpang tindih informasi yang berlebihan. Kondisi ini memperkuat kualitas model regresi karena setiap variabel independen memberikan kontribusi yang berbeda dalam menjelaskan variasi kapasitas fiskal. Oleh sebab itu, model penelitian dinilai layak digunakan untuk menguji pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual pada model regresi. Model regresi yang baik harus memiliki residual dengan varians yang konstan (*homoskedastisitas*), sehingga hasil estimasi koefisien regresi tetap efisien dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan *Breusch-Pagan-Godfrey Test*. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Statistik Uji	Nilai	Probabilitas
<i>F-statistic</i>	4.012340	0.0342
<i>Obs R-squared</i>	10.35471	0.0658
<i>Scaled explained SS</i>	6.467634	0.2633

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai probabilitas *Obs R-squared* sebesar 0,0658, yaitu lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antara belanja barang dan jasa, belanja modal, dan kapasitas fiskal tidak dipengaruhi oleh ketidakkonsistenan penyebaran kesalahan prediksi. Dengan demikian, model regresi memiliki tingkat keandalan yang baik untuk digunakan dalam mengestimasi pengaruh variabel independen terhadap kapasitas fiskal. Terpenuhinya asumsi ini semakin memperkuat bahwa model penelitian layak digunakan untuk menjawab tujuan penelitian secara empiris.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu periode dengan residual pada periode lainnya. Pengujian ini menjadi penting karena data yang digunakan merupakan data *time series* periode 2011-2025 sehingga berpotensi

mengalami hubungan antarresidual dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Hasil pengujian ditampilkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Statistik Uji	Nilai	Probabilitas
F-statistic	1.117014	0.3649
Obs R-squared	2.739115	0.2542

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa nilai probabilitas Obs R-squared sebesar 0,2542, lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi sehingga residual antarperiode bersifat independen. Tidak ditemukannya autokorelasi menunjukkan bahwa perubahan kapasitas fiskal pada suatu tahun tidak dipengaruhi oleh kesalahan estimasi pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memberikan keyakinan bahwa model regresi mampu menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat dan konsisten. Dengan terpenuhinya seluruh asumsi klasik, analisis dapat dilanjutkan pada tahap regresi linier berganda untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kapasitas fiskal.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis ini juga menunjukkan arah hubungan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen melalui nilai koefisien regresi. Selain mengetahui arah pengaruh, model regresi menjadi dasar dalam pengujian hipotesis penelitian. Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1131.911	401.4685	2.819426	0.0155
X1	0.706676	0.203989	3.464284	0.0047
X2	1.174529	0.519822	2.259484	0.0433

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh persamaan regresi: $Y = 1131,911 + 0,706676X_1 + 1,174529X_2 + e$. Nilai konstanta sebesar 1131,911 menunjukkan bahwa ketika belanja barang dan jasa serta belanja modal diasumsikan tetap, kapasitas fiskal memiliki nilai dasar sebesar 1131,911 miliar rupiah. Koefisien regresi belanja barang dan jasa sebesar 0,706676 menunjukkan hubungan positif, yang berarti setiap peningkatan belanja barang dan jasa sebesar satu miliar rupiah akan meningkatkan kapasitas fiskal sebesar 0,706676 miliar rupiah dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, koefisien regresi belanja modal sebesar 1,174529 juga

menunjukkan hubungan positif, sehingga setiap peningkatan belanja modal sebesar satu miliar rupiah diperkirakan akan meningkatkan kapasitas fiskal sebesar 1,174529 miliar rupiah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kedua komponen belanja daerah memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas fiskal, meskipun besarnya pengaruh masing-masing berbeda. Koefisien regresi belanja modal yang lebih besar dibandingkan belanja barang dan jasa mengindikasikan bahwa investasi pemerintah dalam bentuk pembangunan aset dan infrastruktur memiliki dampak yang lebih kuat terhadap peningkatan kemampuan fiskal daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja yang diarahkan pada aktivitas produktif tidak hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas fiskal dalam jangka panjang. Dengan demikian, hasil regresi memberikan gambaran awal bahwa pengelolaan struktur belanja daerah memiliki peranan strategis dalam mendukung kemandirian fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan secara statistik pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap kapasitas fiskal, baik secara parsial maupun simultan. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antarvariabel yang dirumuskan dalam penelitian memiliki tingkat signifikansi yang memadai sehingga dapat mendukung hipotesis yang diajukan. Selain itu, pengujian juga digunakan untuk menilai kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi kapasitas fiskal melalui nilai koefisien determinasi (R^2), sehingga dapat diketahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian, hasil pengujian hipotesis memberikan dasar empiris dalam menarik kesimpulan mengenai pengaruh belanja daerah terhadap kapasitas fiskal. Hasil pengujian hipotesis disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Sig. (Prob.)	Keterangan
Konstanta (C)	1131.911	401.4685	2.819426	0.0155	Signifikan
X1	0.706676	0.203989	3.464284	0.0047	Berpengaruh positif dan signifikan
X2	1.174529	0.519822	2.259484	0.0433	Berpengaruh positif dan signifikan

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa variabel belanja barang dan jasa memiliki nilai t-statistic sebesar 3,464284 dengan nilai probabilitas 0,0047, sedangkan belanja modal memiliki nilai t-statistic sebesar 2,259484 dengan probabilitas 0,0433. Kedua nilai probabilitas tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi 0,05 sehingga menunjukkan bahwa masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal. Secara empiris, hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pengelolaan belanja operasional maupun belanja investasi pemerintah daerah mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah. Belanja barang dan jasa berkontribusi melalui peningkatan efektivitas pelayanan publik dan kelancaran operasional pemerintahan, sedangkan belanja modal berkontribusi melalui pembangunan infrastruktur dan aset produktif yang mendorong aktivitas ekonomi. Temuan ini menunjukkan

bahwa tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pengaruh parsial masing-masing komponen belanja terhadap kapasitas fiskal telah berhasil dibuktikan.

Tabel 9. Ringkasan Model Regresi

Indikator	Nilai
<i>R-squared</i>	0.636882
<i>Adjusted R-squared</i>	0.576363
<i>S.E. of Regression</i>	516.818
<i>Sum Squared Resid</i>	320602.0
<i>Log Likelihood</i>	-113.3277
<i>F-statistic</i>	10.52356
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.002292
<i>Mean Dependent Variable</i>	2696.757
<i>S.D. Dependent Variable</i>	794.1345
<i>Akaike Information Criterion</i>	15.51036
<i>Schwarz Criterion</i>	15.65197
<i>Hannan-Quinn Criterion</i>	15.50885
<i>Durbin-Watson Statistic</i>	1.740434

Hasil uji simultan pada Tabel 8 menunjukkan nilai F-statistic sebesar 10,52356 dengan nilai probabilitas 0,002292, yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa serta belanja modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa model penelitian mampu menjelaskan hubungan kolektif kedua variabel independen terhadap perubahan kapasitas fiskal daerah. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh satu jenis belanja, tetapi merupakan hasil sinergi antara belanja operasional dan belanja modal yang dikelola secara efektif. Oleh karena itu, hasil uji simultan memperkuat tujuan penelitian untuk membuktikan bahwa kedua komponen belanja daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Nilai R-squared yang diperoleh sebesar 0,636882 atau 63,69% menunjukkan bahwa variasi kapasitas fiskal mampu dijelaskan oleh variabel belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar 63,69%, sedangkan sisanya sebesar 36,31% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang cukup kuat dalam menggambarkan perubahan kapasitas fiskal selama periode penelitian. Meskipun demikian, masih terdapat faktor-faktor lain, seperti pendapatan asli daerah, dana transfer, pertumbuhan ekonomi, maupun efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal tetapi belum dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Dengan demikian, hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa model regresi telah

Copyright (c) 2026 Moneter : Jurnal Ilmu Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi

 <https://doi.org/10.51878/moneter.v2i2.13482>



mampu memberikan penjelasan empiris yang memadai sesuai dengan tujuan penelitian, sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model dengan memasukkan variabel-variabel lain yang relevan.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa terhadap Kapasitas Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja operasional yang dikelola secara efektif mampu memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Secara teoritis, hasil tersebut sejalan dengan teori pengeluaran pemerintah (*government expenditure theory*) yang dikemukakan oleh Keynes (1936), yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas ekonomi. Belanja barang dan jasa tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi juga mendukung penyediaan pelayanan publik, pemeliharaan aset, serta pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ketika pelayanan publik menjadi lebih efektif, aktivitas ekonomi masyarakat meningkat sehingga berimplikasi pada meningkatnya penerimaan daerah yang pada akhirnya memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Hardianto et al. (2024) yang menunjukkan bahwa tata kelola anggaran dan desentralisasi fiskal yang efektif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi daerah melalui pengalokasian belanja pemerintah yang lebih produktif. Hasil tersebut diperkuat oleh Simanjuntak et al. (2025) yang menemukan bahwa belanja pemerintah daerah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga memperluas basis penerimaan daerah dan memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Selain itu, Ummah (2025) menjelaskan bahwa daerah dengan kinerja keuangan yang lebih baik cenderung memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan faktor penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal melalui perbaikan pelayanan publik, penguatan aktivitas ekonomi, dan optimalisasi kinerja keuangan daerah. Dengan demikian, tujuan pertama penelitian ini, yaitu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh belanja barang dan jasa terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah berhasil dicapai.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kapasitas Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi pemerintah dalam bentuk pembangunan aset tetap, infrastruktur, jalan, irigasi, gedung, dan fasilitas publik mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Secara teoritis, hasil tersebut juga mendukung teori Keynes yang menjelaskan bahwa investasi pemerintah merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan efisiensi aktivitas ekonomi, memperluas investasi, serta meningkatkan basis penerimaan pemerintah daerah dari pajak maupun retribusi. Oleh karena itu, belanja modal tidak hanya memberikan manfaat pada saat anggaran direalisasikan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi yang bersifat jangka panjang terhadap kapasitas fiskal daerah.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amrillah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa belanja pemerintah, terutama yang diarahkan pada pembangunan sektor-sektor produktif, berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Temuan tersebut diperkuat oleh Sujatmoko et al. (2025) yang menjelaskan bahwa belanja modal memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Diantari (2025) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya menjadi landasan bagi peningkatan kemampuan fiskal pemerintah daerah melalui bertambahnya aktivitas ekonomi dan potensi penerimaan daerah. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa belanja modal yang dialokasikan secara produktif pada pembangunan infrastruktur dan aset publik merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menjawab tujuan kedua penelitian, yaitu membuktikan secara empiris pengaruh belanja modal terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengaruh Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal terhadap Kapasitas Fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat secara Simultan

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa serta belanja modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal tidak hanya dipengaruhi oleh satu jenis belanja, tetapi merupakan hasil sinergi antara belanja operasional dan belanja investasi pemerintah. Belanja barang dan jasa berfungsi menjaga kualitas pelayanan publik dan kelancaran operasional pemerintahan, sedangkan belanja modal berperan dalam meningkatkan produktivitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Kombinasi kedua jenis belanja tersebut menghasilkan pengelolaan anggaran yang lebih efektif sehingga mampu memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, efektivitas struktur belanja daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Amelia et al. (2025) yang menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah, investasi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sinergi berbagai komponen pengeluaran pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi daerah yang pada akhirnya memperkuat basis fiskal pemerintah daerah. Temuan ini diperkuat oleh Yulita (2024) yang menjelaskan bahwa kapasitas fiskal dan belanja modal memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pengelolaan belanja yang produktif menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Selain itu, Ariadi (2025) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dan investasi menghasilkan *multiplier effect* yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi yang menjadi sumber penguatan kapasitas fiskal daerah. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan belanja operasional dan belanja modal secara terpadu dapat menciptakan sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa pengelolaan belanja daerah merupakan determinan penting dalam meningkatkan kapasitas



fiskal pemerintah daerah. Secara keseluruhan, tujuan utama penelitian ini, yaitu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah berhasil dicapai.

Selain memberikan bukti empiris, penelitian ini juga memiliki kontribusi ilmiah dibandingkan penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu mengkaji kapasitas fiskal pada tingkat kabupaten/kota dengan mengombinasikan berbagai variabel ekonomi lainnya. Penelitian ini secara khusus memfokuskan analisis pada tingkat pemerintah provinsi dengan menggunakan data *time series* periode 2011–2025 sehingga mampu menggambarkan dinamika pengelolaan belanja daerah dalam jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua komponen belanja daerah memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperkuat kapasitas fiskal, sehingga efektivitas pengelolaan anggaran menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai hubungan belanja barang dan jasa serta belanja modal terhadap kapasitas fiskal pemerintah provinsi berdasarkan regulasi terbaru mengenai peta kapasitas fiskal daerah, yang dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan penganggaran daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja barang dan jasa serta belanja modal merupakan faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Belanja barang dan jasa berkontribusi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan belanja modal memberikan dampak yang lebih berorientasi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur dan aset produktif. Sinergi kedua jenis belanja tersebut menghasilkan pengelolaan fiskal yang lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Temuan ini menjawab tujuan penelitian bahwa belanja barang dan jasa maupun belanja modal, baik secara parsial maupun simultan, memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal tidak hanya bergantung pada besarnya alokasi anggaran, tetapi juga pada kualitas dan efektivitas pengelolaan belanja daerah.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan penganggaran pada keseimbangan antara belanja operasional yang mendukung kualitas pelayanan publik dan belanja modal yang mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian juga memperkaya kajian mengenai hubungan struktur belanja daerah dan kapasitas fiskal pada tingkat pemerintah provinsi, yang selama ini masih relatif terbatas dibandingkan penelitian pada tingkat kabupaten/kota. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan dua komponen belanja daerah sehingga belum menggambarkan seluruh faktor yang memengaruhi kapasitas fiskal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model dengan memasukkan variabel lain, seperti pendapatan asli daerah, dana transfer, pertumbuhan ekonomi, maupun kualitas tata kelola keuangan daerah, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kapasitas fiskal.



DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, A. P., Sutanto, H., & Fadlli, M. D. (2025). Pengaruh Konsumsi, Investasi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 18-34.
<https://doi.org/10.59827/jie.v4i2.308>
- Amrillah, Irwan, M., & Firmansyah, M. (2023). Belanja Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 8–19.
<https://elastisitas.unram.ac.id/index.php/elastisitas/article/view/102>
- Ariadi, A. L. (2025). *Analisis Multiplier Efek Pengeluaran Pemerintah, Investasi Dan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (2013-2022)* *Analysis The Multiplier Effect Of Government Spending, Investment, And Household Consumption On Economic Growth In Indonesia (2013-2022)*. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/47939/>
- Dame, M. D., Rengga, A., & Meylano, N. H. (2025). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Di Bapperida. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 1693–1705. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.42090>
- Diantari, A. (2025). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan* *The Effect Of Government Expenditure, Gross Fixed Capital Formation, And Labor On Economic Growth In South Sulawesi*. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/52671/>
- Dwi, S. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Dalam Perspektif Islam (Survey Pada Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2019)*. (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG). <https://repository.radenintan.ac.id/17365/>
- Ferli, A. A. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kapasitas Fiskal Di Kabupaten Pringsewu Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2020*. (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG). <https://repository.radenintan.ac.id/21162/>
- Fidmatan, F., Setiawan, A., Silvia, A. S., & Rusmini, A. (2025). Implementasi Asas Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Studi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Pendidikan*, 272-281.
<https://journal.yapakama.com/index.php/JAMAPEDIK/article/view/415>
- Hardianto, H., Ismail, T., & Sapiri, M. (2024). Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola Anggaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Alokasi Anggaran dan Kapasitas Ekonomi: (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Barat). *Al-Buhuts*, 20(1), 209-228.
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/4719>
- Hazna, R. (2025). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kebumen*. (Doctoral dissertation, Politeknik YKPN Yogyakarta). <https://eprints.poltekykpn.ac.id/id/eprint/337/>
- Koordinator, K. (2024). *Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2021-2024*.
<https://www.neliti.com/publications/641674/laporanpelaksanaandan-evaluasi-ppke>
- Linda Martalia, L. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kemiskinan, Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota*



- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023). (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan). <https://etheses.uingusdur.ac.id/13688/>
- Nazikha, R. S., & Rahmawati, F. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kapasitas Fiskal Daerah, Dan Elastisitas Fiskal Terhadap Pertumbuhan Inklusif Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(2), 120–134. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p120-134>
- Nugraha, J. A. (2025). *Analisis Pengaruh Pad, Dana Transfer, Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Studi 35 Kab/Kota Jawa Tengah 2020-2023*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). <https://repository.unissula.ac.id/43191/>
- Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2018. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 1-26. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/11149>
- Simanjuntak, G. Y., Yulika, M., Putri, D. N., & Pangestoeti, W. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(6), 260-273. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5158>
- Solihin, D. (2025). Kemandirian Fiskal Kota Palangka Raya: Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2024. *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, 9(2), 34-44. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v9i2.9013>
- Sujatmoko, T., Suharsono, R. S., & Sanosra, A. (2025). Village Funds, Capital Expenditures, and Tax Sharing in Infrastructure Development: Dana Desa, Belanja Modal, dan Pembagian Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur. *Academia Open*, 10(2), 10-21070. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11755>
- Sulhia, B. A. (2025). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022–2024. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 5(2), 17-28. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jakpi/article/view/6263>
- Ummah, R. (2025). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pulau Nusa Tenggara Dan Pulau Papua*. (Doctoral dissertation, UNUSIA). <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/981/>
- Wahyudi, T., & Nofianti, N. (2025). Belanja modal dan pembangunan infrastruktur daerah di Indonesia: Sebuah kajian sistematis. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 4(1). <https://doi.org/10.24246/dekat.v4i1.18165>
- Yulita, S. (2024). *Analisis Kapasitas Fiskal Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Periode 2018-2022 Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). <https://repository.radenintan.ac.id/36655/>